

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Penyediaan Barang Publik Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Desa Nagaleah, Kabupaten Barito Timur

Fendy Hariatama ¹, Rinto Alexandro ², Tonich ³

¹ Universitas Palangka Raya; fendyhariatama@fkip.upr.ac.id

² Universitas Palangka Raya; rinto.alexandro@fkip.upr.ac.id

³ Universitas Palangka Raya; tonichuda@fkip.upr.ac.id

* Correspondence author: fendyhariatama@fkip.upr.ac.id; Tel.: +62-822-3107-1994

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund utilization in providing public goods based on local wisdom and its implications for strengthening community economic literacy in Nagaleah Village, East Barito Regency. The research employed a qualitative approach using a case study method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted descriptively and analytically by linking empirical findings to public economics theory, fiscal decentralization, and community economic education. The findings indicate that the utilization of Village Funds in Nagaleah Village is relatively effective in providing essential public goods that align with community needs. This effectiveness is influenced not only by planning and budget management but also by the integration of local wisdom, such as mutual cooperation and deliberation, which function as social capital. These values encourage community participation, strengthen a sense of ownership over public goods, and serve as a medium for informal economic learning in understanding budget management and development priorities. This study concludes that Village Funds play a strategic role not only as a fiscal policy instrument at the village level but also as a means of strengthening community-based economic education. The findings contribute to policy discussions on improving the quality of public spending, community participation, and economic literacy in rural development.

Keywords: Village Fund; Public Goods; Local Wisdom; Community Economic Literacy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik berbasis kearifan lokal serta efektivitasnya terhadap penguatan literasi ekonomi masyarakat di Desa Nagaleah, Kabupaten Barito Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan temuan empiris pada teori ekonomi publik, desentralisasi fiskal, dan pendidikan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah relatif efektif dalam menyediakan barang-barang dasar publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan anggaran pengelolaan, tetapi juga diperkuat oleh integrasi kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah yang berfungsi sebagai modal sosial. Nilai-nilai tersebut mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap barang publik, serta menjadi media pembelajaran ekonomi nonformal bagi masyarakat desa dalam memahami anggaran pengelolaan dan prioritas pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Desa berperan dalam strategi tidak hanya sebagai instrumen kebijakan fiskal desa, tetapi juga sebagai sarana penguatan komunitas pendidikan dan ekonomi. Temuan ini memberikan pentingnya bagi kebijakan pengembangan Dana Desa yang lebih berorientasi pada kualitas belanja publik, partisipasi masyarakat, dan peningkatan literasi ekonomi di tingkat desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Barang Publik; Kearifan Lokal; Literasi Ekonomi Masyarakat

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama kebijakan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik, memperkuat kemandirian daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan perdesaan, kebijakan ini diwujudkan melalui pemberian Dana Desa sebagai instrumen fiskal yang secara langsung ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015, Dana Desa telah mengalami peningkatan

alokasi anggaran yang signifikan dan menjadi salah satu program strategis nasional dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas dan mengurangi pengurangan wilayah (Sintha Natalia Pramudya Wardani, 2024), (Maria Vianey Rae et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi publik, Dana Desa dapat dipahami sebagai bentuk transfer fiskal antarpemerintah yang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dalam menyediakan barang dan layanan dasar publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hariatama et al., 2024). Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam menyediakan barang publik yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, serta sarana sosial lainnya. Oleh karena itu, efektivitas pemanfaatan Dana Desa menjadi isu krusial, tidak hanya dari sisi pemenuhan administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga kaitannya dengan kualitas barang publik yang dihasilkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Rahmalia & Mubarak, 2025).

Meskipun Dana Desa telah membuka ruang fiskal yang relatif besar bagi desa, peningkatan alokasi anggaran tersebut tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya perencanaan pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kecenderungan penggunaan anggaran yang bersifat normatif dan administratif (Supriadin & Wardan, 2024). Dalam banyak kasus, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa masih diukur berdasarkan tingkat serapan anggaran dan penyelesaian proyek fisik, sedangkan aspek efektivitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa belum sepenuhnya menjadi perhatian utama (Muliadi et al., 2019).

Dalam kajian ekonomi publik, efektivitas kebijakan fiskal lokal seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyediakan barang publik secara optimal, baik dari sisi kualitas, aksesibilitas, maupun kelangsungan manfaatnya. Barang publik desa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari barang privat, di antaranya sifat non-rivalry dan non-excludability, serta keterkaitannya dengan kepentingan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, penyediaan barang publik di tingkat desa tidak hanya memerlukan dukungan anggaran yang memadai, tetapi juga mekanisme kelembagaan dan sosial yang mampu memastikan bahwa barang publik tersebut benar-benar dimanfaatkan dan dilindungi secara kolektif oleh masyarakat (Sihite et al., 2023).

Dalam konteks inilah, kearifan lokal memiliki peran yang semakin penting. (Makalalag et al., 2020), (Hasan Agus et al., 2019), Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang berkembang dan diwariskan dalam masyarakat desa, seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, serta kepemilikan kolektif terhadap sumber daya bersama. Dalam perspektif ekonomi publik dan kelembagaan ekonomi, kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang berfungsi menurunkan biaya transaksi, memperkuat koordinasi kolektif, serta meningkatkan efektivitas penyediaan barang publik. Keberadaan kearifan lokal berpotensi mengurangi berbagai kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah yang sering muncul dalam penyediaan barang publik, terutama di wilayah perdesaan.

Namun demikian, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan publik, termasuk dalam pemanfaatan Dana Desa, masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik maupun kajian akademik (Heru Wicaksono & Iin Ismayanti, 2023), (Sulistiyowati et al., 2025). Sebagian besar penelitian mengenai Dana Desa masih fokus pada aspek tata kelola keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampaknya terhadap indikator makro seperti kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kajian yang secara eksplisit menempatkan Dana Desa dalam kerangka penyediaan barang publik dan dihubungkannya dengan peran kearifan lokal sebagai faktor penentu efektivitas kebijakan masih relatif terbatas. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana konteks sosial dan budaya lokal mempengaruhi keberhasilan kebijakan fiskal desa belum tergalai secara memadai.

Selain itu, sebagian besar penelitian Dana Desa menggunakan pendekatan kuantitatif berskala nasional atau regional yang cenderung mendorong dinamika lokal di tingkat desa seperti dalam penelitian (Berutu et al., 2024), (Lilla Qadri et al., 2026), Pendekatan tersebut memang penting untuk melihat pola umum, namun kurang mampu menjelaskan variasi antar desa yang sering kali menjadi

faktor kunci keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dalam konteks ekonomi masyarakat, pemahaman mengenai dinamika lokal menjadi sangat penting, mengingat efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan setempat. Oleh karena itu, kajian berbasis kasus desa yang dianalisis secara mendalam memiliki nilai strategi dalam memperkaya literatur dan memberikan pentingnya kebijakan yang lebih kontekstual.

Desa Nagaleah di Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu contoh desa yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini (Fendy Hariatama et al., 2024). Desa ini memiliki karakteristik perdesaan yang masih kuat, baik dari sisi struktur ekonomi, pola sosial, maupun praktik kearifan lokal yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Dana Desa di Desa Nagaleah telah dimanfaatkan untuk berbagai program penyediaan barang publik, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, serta peningkatan fasilitas sosial. Pelaksana program-program tersebut tidak hanya mengandalkan mekanisme formal pemerintahan desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang telah mengakar kuat.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dalam kajian ekonomi publik, yaitu sejauh mana pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah telah efektif dalam menyediakan barang publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kepatuhan administratif, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut untuk beradaptasi dengan konteks lokal dan memobilisasi potensi sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi celah penelitian yang masih ada dalam kajian Dana Desa. Penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik dengan mengintegrasikan perspektif kearifan lokal sebagai faktor penting dalam kebijakan fiskal desa. Dengan mengambil studi kasus Desa Nagaleah, Kabupaten Barito Timur, penelitian ini berupaya menghadirkan perekonomian masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan output pembangunan, tetapi juga pada kualitas, pencernaan, dan dampak sosial dari barang-barang publik yang dihasilkan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik di Desa Nagaleah; dan (2) mengkaji peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyediaan barang publik melalui Dana Desa. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal desa, penyediaan barang publik, dan dinamika sosial-budaya masyarakat desa.

Secara kontekstual, penelitian ini dibangun atas kerangka ekonomi publik yang mengintegrasikan teori barang publik, teori desentralisasi fiskal, dan konsep kearifan lokal sebagai modal sosial. Dana Desa diposisikan sebagai instrumen kebijakan fiskal lokal, sementara penyediaan barang publik desa dipahami sebagai kebijakan keluaran yang dipengaruhi oleh mekanisme formal pemerintahan desa dan mekanisme informal berbasis kearifan lokal. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas kajian ekonomi publik yang lebih kontekstual, sekaligus memberikan efektivitas kebijakan yang relevan bagi penguatan pembangunan desa di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik berbasis kearifan lokal pada konteks desa tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika kebijakan publik di tingkat desa secara komprehensif, dengan mempertimbangkan interaksi antara kebijakan fiskal, kelembagaan desa, dan praktik sosial budaya masyarakat.

Pendekatan kualitatif dipandang relevan dalam kajian ekonomi publik yang fokus pada evaluasi kebijakan, terutama ketika efektivitas kebijakan tidak hanya diukur melalui indikator kuantitatif, tetapi

juga melalui kualitas pelayanan publik, tingkat partisipasi masyarakat, dan keinginan manfaat kebijakan. Dengan demikian, desain penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam dibandingkan dengan pendekatan survei berskala besar.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nagaleah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Desa Nagaleah merupakan salah satu desa yang secara aktif memanfaatkan Dana Desa untuk menyediakan barang publik, serta memiliki karakteristik kearifan lokal yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Objek penelitian adalah pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik desa, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan layanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Dana Desa. Informan kuncinya meliputi aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat yang menjadi penerima manfaat barang publik desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa dan pemerintah daerah, seperti dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan realisasi Dana Desa, serta peraturan dan kebijakan terkait Dana Desa. Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian terdahulu dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Nagaleah telah dimanfaatkan secara konsisten untuk mendukung penyediaan barang publik desa, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan layanan sosial. Berdasarkan dokumen perencanaan dan laporan realisasi anggaran desa, Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa, sarana air bersih, fasilitas sanitasi, serta beberapa fasilitas pendukung kegiatan sosial masyarakat. Pola alokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menempatkan penyediaan barang publik sebagai prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah desa menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait pembangunan desa. Meskipun tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana penyalarsan antara prioritas kebijakan desa dan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pelaksanaan, penggunaan Dana Desa di Desa Nagaleah relatif mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, baik terkait jenis kegiatan yang didanai maupun prosedur administrasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi proses pelaksanaan dan pemanfaatan barang publik di tingkat masyarakat.

Efektivitas Penyediaan Barang Publik Desa

Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penyediaan barang publik dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kualitas dan aksesibilitas barang publik, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan manfaat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sebagian besar informan menilai bahwa program pembangunan yang dibiayai Dana Desa relatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan desa, misalnya, dipandang sebagai kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbaikan akses jalan dinilai telah mempermudah distribusi hasil pertanian dan meningkatkan akses masyarakat

terhadap layanan dasar di luar desa.

Selain itu, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi juga dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Informan menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas tersebut telah meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi secara nyata dalam penyediaan barang publik yang bersifat esensial.

Dari sisi kualitas, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur yang dibangun melalui Dana Desa berada dalam kondisi layak dan dapat digunakan oleh masyarakat. Kualitas bangunan dinilai cukup baik meskipun terdapat variasi antar jenis kegiatan. Namun demikian, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kemampuan teknis pelaksana di tingkat desa.

Aksesibilitas barang publik yang dihasilkan melalui Dana Desa juga dinilai relatif baik. Barang publik seperti jalan desa dan fasilitas air bersih dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat tanpa pembatasan. Hal ini mencerminkan karakteristik barang publik yang manfaatnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah. Partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan barang publik. Masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong, baik dalam proses pembangunan maupun dalam menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun.

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa didorong oleh nilai-nilai kearifan lokal yang masih kuat. Gotong royong dipahami sebagai kewajiban moral sekaligus bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai ini mendorong masyarakat untuk berkontribusi tenaga dan waktu tanpa mengharapkan imbalan finansial secara langsung.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan rasa memiliki terhadap barang publik yang dihasilkan. Informan menyampaikan bahwa fasilitas yang dibangun melalui Dana Desa cenderung lebih dijaga dan dirawat apabila masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini berdampak positif terhadap keberlanjutan manfaat barang publik dan mengurangi risiko kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu merata. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi lebih aktif ditunjukkan oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya cenderung pasif. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti usia, tingkat pendidikan, dan keterikatan sosial dalam komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kearifan lokal berperan penting, partisipasi masyarakat tetap memerlukan penguatan melalui pendekatan kelembagaan yang inklusif.

Peran Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Efektivitas Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial menjadi mekanisme informal yang memperkuat implementasi kebijakan publik desa. Kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang memfasilitasi koordinasi kolektif dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam proses perencanaan, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai forum formal, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya dialog dan konsensus berbasis nilai-nilai lokal. Proses ini membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan legitimasi keputusan pembangunan desa. Informan menyampaikan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah desa cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan kepentingan bersama.

Dalam tahap pelaksanaan, gotong royong menjadi faktor penting dalam menekan biaya pelaksanaan pembangunan dan mempercepat penyelesaian kegiatan. Keterlibatan masyarakat secara

sukarela mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja berbayar dan memungkinkan optimalisasi penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berkontribusi secara langsung terhadap efisiensi penggunaan anggaran publik di tingkat desa.

Selain itu, kearifan lokal juga berperan dalam menjaga keberlanjutan manfaat barang publik. Masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk memelihara fasilitas yang telah dibangun, karena fasilitas tersebut dipandang sebagai milik bersama. Kesadaran ini mengurangi beban pemerintah desa dalam pemeliharaan barang publik dan memperpanjang usia manfaat fasilitas.

Tantangan dalam Pemanfaatan Dana Desa

Meskipun pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif baik, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan pembangunan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan pemeliharaan barang publik masih sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, fasilitas yang dibangun berpotensi mengalami penurunan kualitas apabila partisipasi masyarakat melemah. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal perlu terus diperkuat dan diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan desa.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran Dana Desa yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan ini menuntut pemerintah desa untuk melakukan prioritas yang tepat agar Dana Desa dapat memberikan manfaat yang optimal dalam penyediaan barang publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah relatif efektif dalam menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat. Efektivitas tersebut tercermin dalam kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kualitas dan aksesibilitas barang publik, serta tingkat partisipasi masyarakat yang didukung oleh kearifan lokal. Kearifan lokal berperan sebagai modal sosial yang memperkuat implementasi kebijakan publik desa dan meningkatkan keberlanjutan manfaat barang publik.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan Dana Desa tidak hanya bergantung pada aspek fiskal dan administratif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik secara kolektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Efektivitas Dana Desa sebagai Instrumen Penyediaan Barang Publik

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Nagaleah relatif efektif dalam menyediakan barang-barang publik dasar memperkuat pandangan dalam teori ekonomi publik mengenai fungsi alokatif pemerintah. (Musgrave, 1959), salah satu fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Dalam konteks pemerintahan desa, Dana Desa berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi tersebut lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Sulasmi & Susanti, 2025) yang menegaskan bahwa efektivitas belanja masyarakat sangat bergantung pada ketepatan alokasi dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif teori barang publik, penyediaan infrastruktur dasar dan layanan sosial di Desa Nagaleah mencerminkan karakteristik non-rivalry dan non-excludability, di mana manfaatnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat desa (Amiruddin Idris, 2018). Efektivitas penyediaan barang publik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menginternalisasi preferensi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mendukung argumen (Lusia Lestina Halawa et al., 2025) dalam teori desentralisasi fiskal bahwa pemerintah lokal memiliki keunggulan

informasi dalam menyediakan barang publik dibandingkan pemerintah pusat.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas Dana Desa tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sejalan dengan pandangan (Sistia et al., 2024), kebijakan publik yang efektif membutuhkan institusi yang mampu mengelola sumber daya secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, efektivitas Dana Desa perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan fiskal, kapasitas kelembagaan, dan konteks sosial desa.

Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Kebijakan Publik Desa

Hasil penelitian ini mendukung teori sentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik (Huda et al., 2024). Dalam kasus Desa Nagaleah, kewenangan pengelolaan Dana Desa memungkinkan pemerintah desa merancang program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, khususnya dalam penyediaan barang-barang publik yang bersifat mendesak.

Namun sejalan dengan pandangan desentralisasi (Kadek Torry Pingkany Dwijayanti & I Putu Gede Diatmika, 2025) fiskal juga mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang mampu. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa memperkuat argumen bahwa desentralisasi fiskal tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Hari Akbar Maulana Pratama et al., 2024) yang menemukan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan kapasitas aparatur desa.

Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat literatur ekonomi masyarakat yang menekankan bahwa Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Tanpa dukungan tersebut, potensi Dana Desa untuk meningkatkan kualitas barang publik akan sulit tercapai secara optimal.

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Penyediaan Barang Publik

Salah satu temuan kunci penelitian ini adalah peran signifikan kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kearifan lokal dapat dipahami sebagai bagian dari modal sosial yang mempengaruhi perilaku kolektif masyarakat (Makalalag et al., 2020). Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah berfungsi sebagai mekanisme informal yang memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam penyediaan barang publik desa.

Temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Permata Sari & Riofita, 2025), yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya bersama dan penyediaan barang publik akan lebih efektif apabila didukung oleh institusi lokal dan norma sosial yang kuat. Dalam konteks Desa Nagaleah, kearifan lokal berperan dalam menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan bersama, sehingga memperkuat implementasi kebijakan Dana Desa.

Penelitian ini juga mendukung temuan empiris di Indonesia yang menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam kebijakan desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan perdesaan (Vuspitasari & Siahaan, 2022). Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai faktor ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik desa.

Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Barang Publik

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah memperkuat argumentasi dalam ekonomi masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci hilangnya barang publik. (Bakara et al., 2024), penyediaan barang publik sering menghadapi masalah free rider, yang dapat menghambat keinginan manfaat kebijakan. Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal mampu mengurangi kecenderungan free rider melalui mekanisme kontrol sosial informal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Febriani et al., 2025), yang menekankan bahwa modal sosial berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan kinerja institusi lokal. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, rasa memiliki

terhadap barang publik meningkat, sehingga keinginan manfaat kebijakan lebih terjaga.

Namun demikian, temuan mengenai variasi tingkat partisipasi antar kelompok masyarakat juga mengkonfirmasi pandangan bahwa modal sosial tidak selalu terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Implikasi Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Publik

Dalam perspektif ekonomi publik, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Dana Desa sebagai kebijakan fiskal tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kelembagaan desa. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Hariatama et al., 2024), kebijakan publik yang efektif membutuhkan kombinasi antara desain kebijakan yang tepat dan institusi pelaksana yang kuat. Integrasi kearifan lokal dalam pemanfaatan Dana Desa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja masyarakat di tingkat desa.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Fatasyeh & Nawatmi, 2025) yang menekankan pentingnya kualitas belanja masyarakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Dana Desa, kualitas belanja masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan administratif, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dan pemanfaatan modal sosial lokal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Nagaleah telah memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan barang publik, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi lebih pada penekanan perencanaan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa mengintegrasikan kearifan lokal dalam tata kelola pembangunan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan terbukti memperkuat partisipasi masyarakat, menekan biaya koordinasi, serta meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas publik yang dibangun.

Dari perspektif ekonomi publik, temuan ini menyatakan bahwa belanja publik di tingkat desa akan lebih efisien dan berdampak luas apabila dipadukan dengan modal sosial dan institusi lokal yang hidup dalam masyarakat. Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan pembelajaran ekonomi komunitas yang mampu meningkatkan literasi ekonomi serta kapasitas kolektif warga. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa ke depan perlu menempatkan kearifan lokal sebagai dasar perencanaan partisipatif agar penyediaan barang publik tidak berhenti pada output fisik, melainkan bertransformasi menjadi proses pembangunan yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Rektor Universitas Palangka Raya, Bapak Prof. Dr. Salampak, MS,

Terima kasih kepada Kepala Desa Nagaleah, Bapak M. Subli, S.IP

Terima kasih kepada Kepala Seluruh Aparatur Desa Nagaelah

Terima kasih kepada Kepala Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama Desa Nagaleah serta semua pihak yang telah membantu hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Referensi

Amiruddin Idris. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.

Bakara, S., Wulandari, M., Handayani Lubis, E., Rahmansyah Nasution, A., Maulana, J., Naila Rahmi, S., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).

Berutu, E., Iskandar, A., Tamba, S. M. U., Saragih, R. S., Sinaga, J. A. I. S., Siagian, J., Ginting, E. Z., &

- Ivanna, J. (2024). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. *Journal of Law & Policy Review*, 2(1), 21–31. <https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i1.74>
- Fatasyeh, Y. K., & Nawatmi, S. (2025). Analisis Kualitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 577–589.
- Febriani, L., Fadillah, N., & Negara STIA Lancang Kuning Dumai, A. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>
- Fendy Hariatama, M. Subli, Muhamad Taufik Hidayat, Agung Trinugroho, Muhammad Ikhwanul Asy Syifa, Muhammad Huseini, Nadira Andari Arien, Hairun Nisa, Enjelita, Alfataqi Yati, Iska, A. Dini Marito Hutabalian, Rama Bina Satria, Rista Halomoan Siregar, & Fitri Dara Sukawati. (2024). *Cerita Dari Nagaleah, Sejarah dan Kearifan Lokal* (Muhamad Basyrul Muvid, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Global Aksara Pers.
- Hari Akbar Maulana Pratama, Rosnawintang, & Syamsir Nur. (2024). Analisis Faktor-Faktor Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9(2), 268–280. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Hariatama, F., Alexandro, R., Buji, G. E., Rohaetin, S., & Eriawaty. (2024). Peran Ekonomi Publik dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Lingkungan Ekowisata Nyaru Menteng. *Kaharati*, 4(2), 72–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.52850/jptupr.v4i2.15756>
- Hasan Agus, A. R., Ghozali Usman, L., & Paiton Probolinggo Jawa Timur, J. (2019). Kebijakan Sentralisasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Media Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia*, 3(2). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia>
- Heru Wicaksono, & Iin Ismayanti. (2023). Integrasi Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Lokal dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36090>
- Huda, R. A., Ade Puspita, R., Hasanah, S. N., Malik, A., Syariah, P. E., Raden, U., & Lampung, I. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *KALIANDA HALOK GAGAS*, 7(2), 189–201. <https://doi.org/10.52655/KHG.V7I2.102>
- Kadek Torry Pingkany Dwijayanti, & I Putu Gede Diatmika. (2025). Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan, Serta Ketergantungan Keuangan Daerah di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 217–227. ejournal.undiksha.ac.id
- Lilla Qadri, U., Reizsa Adhitya, T., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2026). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ekonomika*, 19(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1>
- Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Makalalag, S. U., Sukoharsono, E. G., & Djamhuri, A. (2020). Kearifan Lokal Sebagai Simbol Dalam Keputusan Kebijakan Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.21>
- Maria Vianey Rae, Maria Goreti Malut, & Antonius Y.W. Timuneno, S. A. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 2(2), 346–363. <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes>
- Muliadi, Lukman Hakim, & M. Isa Ansari. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1, 2715–2952. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jppm/article/view/3585/pdf>
- Musgrave, R. (1959). *Teori keuangan publik: Sebuah studi tentang ekonomi publik*. McGraw-Hill.
- Permata Sari, S., & Riofita, H. (2025). Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16342–16346.
- Rahmalia, R., & Mubarak, A. (2025). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 8. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.304>
- Sihite, R. R., Adam, A., & Musthafa, W. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2146>
- Sintha Natalia Pramudya Wardani. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/index>
- Sistia, M. P., Surya Dharma, A., Budiman, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Amuntai, I. A. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(1), 28–35. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/245>
- Sulasmi, S., & Susanti, A. (2025). Strategi Efektif Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 93–104. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21707>
- Sulistyowati, Adji Suradji Muhammad, Dewi Nadya Maharani, & Gusti Bintang Maharaja. (2025). Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504>
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Vuspitasari, B. K., & Siahaan, S. V. B. (2022). Hambatan Kearifan Lokal Anyaman Bambu Sebagai Potensi Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Di Desa Suka Maju. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1237–1244. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2266>